



Pranatan Anyar



dr Heru Sulistyowati membagikan masker.

KR-Dedy EW

DUKUNG PENCEGAHAN COVID-19 RSUD Wonosari Sosialisasi 4M

GUNUNGKIDUL (KR) - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Kabupaten Gunungkidul melaksanakan sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), mulai dari memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan (4M) di Simpang Empat Jeruksari, Wonosari, Jumat (27/11).

Kegiatan dihadiri Direktur RSUD Wonosari dr Heru Sulistyowati SpA, Sekretaris Dinas Kesehatan Gunungkidul Priyanta Madya, anggota TNI dan Polri. Tim membagikan masker kepada pengguna jalan serta mensosialisasikan 4M. "Melalui sosialisasi dan pembagian masker diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat serta mendukung pencegahan Covid-19," kata Heru Sulistyowati.

Diungkapkan, selain harus membiasakan 4M, diperlukan upaya lain dengan tetap menjaga kesehatan, baik dengan ber-

olahraga, makan yang cukup dan beristirahat.

Kasus Covid-19 di Gunungkidul grafiknya naik dan diperlukan upaya bersamasama agar mampu melakukan pencegahan. Masyarakat diharapkan meningkat kesadarannya dalam melaksanakan 4M. "Pelaksanaan sosialisasi AKB dan 4M ini juga merupakan rangkaian Hari Jadi ke-72 RSUD Wonosari," imbuhnya.

Priyanta Madya memberikan apresiasi kepada RSUD Wonosari karena melaksanakan sosialisasi AKB dan 4M. Dijelaskan, kasus Covid-19 di Gunungkidul secara akumulatif mencapai 434 kasus positif, sekarang 62 masih dirawat. Selebihnya sembuh dan 15 kasus meninggal dunia. "Ancaman Covid-19 ini benar-benar nyata, sehingga diperlukan dukungan semua pihak. Gerakan 4M perlu didorong dan ditingkatkan di masyarakat," jelasnya. **(Ded)-d**

TAHAP PERTAMA

DIY Dapat 2,2 Juta Vaksin

YOGYA (KR) - Pemda DIY diminta menyiapkan diri menyambut pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada 2021 mendatang. Pada tahap pertama DIY akan mendapatkan jatah alokasi vaksin dari Pemerintah Pusat sebanyak 2,2 juta vaksin. Namun belum diketahui pasti, kapan vaksin Covid-19 tersebut bakal didistribusikan ke daerah.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY drg Pembajun Setyaningastutie MKes menegaskan, data alokasi vaksin Covid-19 tersebut belum pasti karena masih berjalan. Artinya DIY bisa lebih banyak atau bahkan dikurangi alokasi vaksinnya.

"Masih disesuaikan lagi dan tergantung jumlah penduduk DIY yang berusia 18-59 tahun," kata Pembajun usai mendampingi Wakil Gubernur DIY Paku Alam X video conference pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Gedhong Pracimosono Kepatihan, Jumat (27/11).

Pembajun menjelaskan, kriteria calon penerima vaksin Covid-19 yaitu tidak memiliki komorbid atau penyakit penyerta, tidak pernah terkena Covid-19 dalam arti terkonfirmasi positif dan tidak sedang menderita penyakit infeksi. Contohnya terkena HIV/AIDS, meningitis atau radang selaput otak dan penyakit infeksi lainnya. "Jadi dari 2,2 juta vaksin Covid-19 tersebut, pendistribusiannya tidak disebar berdasarkan kabupaten/kota di DIY, tetapi calon penerima vaksin yang sesuai kriteria," tandasnya.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap pertama, disampaikan Pembajun akan diberikan kepada para tenaga kesehatan dan para pemberi pelayanan publik termasuk orang-orang yang berada di garda terdepan yaitu TNI/Polri. Untuk itu, Pemda DIY masih menunggu prosedur maupun petunjuk teknis (juktis) dari Kementerian Kesehatan. **(Ira/Ria)-d**

KASUS COVID-19 DI BANYUMAS TINGGI

Kepala OPD Dilarang Dinas Luar

BANYUMAS (KR) - Meningkatnya kasus penularan Covid-19 di Kabupaten Banyumas yang semakin tinggi, dengan angka positivity rate di atas 5 persen yakni 6,28 persen dan angka kesembuhan 57,5 persen, membuat Bupati Banyumas Achmad Husein melarang Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pergi dinas luar. "Hal itu untuk memberikan contoh kepada masyarakat agar tidak pergi ke luar daerah. Kebijakan ini dikeluarkan dalam rangka menekan kasus Covid-19 di Banyumas," kata Achmad Husein, Jumat (27/11).

Menurutnya, selama dua minggu ke depan, pihaknya melarang seluruh Kepala OPD di Kabupaten Banyumas untuk bepergian ke luar kota. Kebijakan pengendalian di Banyumas memang terus dilangsungkan, karena kasus Covid-19 meng-

alami kenaikan cukup signifikan.

Ia mencontohkan pada Rabu (25/11) lalu terjadi kenaikan 88 kasus, pasien meninggal tujuh orang, salah satunya ibu hamil berusia 19 tahun. Terkait peningkatan kasus Covid-19, Pemkab Banyumas juga telah menyiapkan penambahan tempat karantina seperti sejumlah hotel di Baturraden untuk menampung pasien Covid-19 dengan kondisi baik atau tanpa gejala.

Di luar sejumlah rumah sakit, Pemkab Banyumas saat ini menyiapkan empat lokasi yang dijadikan tempat karantina, yakni Balai Diklat Baturraden, Pondok Slamet, Wisma Wijayakusuma dan hotel di Baturraden. Kemudian bagi pasien yang melakukan isolasi mandiri terus dipantau dan membuat surat pernyataan agar tidak pergi ke mana-mana. **(Dri)-d**

Sekolah Lengkapi Sarpras Prokes

KULONPROGO (KR) - Penyelenggara pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Kulonprogo diminta mempersiapkan sarana prasarana protokol kesehatan (prokes) untuk mencegah penularan Covid-19 di sekolah masing-masing, menghadapi bakal mulai dilaksanakannya pembelajaran tatap muka pada awal 2021 mendatang.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulonprogo Arif Prastowo menyampaikan hal itu, menanggapi keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang memperbolehkan kegiatan belajar tatap muka di sekolah. "Disdikpora sedang menyiapkan dan memastikan sekolah sudah melengkapi sarana prasarana protokol kesehatan untuk mencegah penularan Co-

vid-19," ujar Arif Prastowo, Jumat (27/11).

Mendikbud Nadiem Makarim mengeluarkan surat keputusan memperbolehkan sekolah mengadakan kegiatan pembelajaran tatap muka mulai 2021 dengan ketentuan memenuhi persyaratan tertentu. Penyelenggara pendidikan di setiap sekolah harus menyediakan *thermogun*, tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menyediakan *handsanitizer*, dan menggunakan masker.

Kondisi kelas pembelajaran juga harus memenuhi persyaratan di masa pandemi Covid-19. Pengaturan tempat duduk dan cara pembelajaran memberlakukan sistem shifting atau tidak tergantung jumlah siswa di sekolah tersebut. Pertemuan siswa di kelas hanya pada saat menerima pelajaran. **(Ras)-d**

UNTUK MEMULAI PERKULIAHAN TATAP MUKA

Warga Kampus Harus Saling Melindungi

JAKARTA (KR) - Menghadapi perkuliahan secara tatap muka pada Januari 2021 mendatang, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dikti Kemendikbud) Nizam meminta warga kampus bisa saling peduli dan melindungi. Semua protokol kesehatan harus ditegakkan, dipantau dan dievaluasi secara berkala.

"Pihak kampus juga tidak perlu memaksakan perkuliahan tatap muka jika ada yang belum memenuhi syarat. Perkuliahan menurutnya tetap bisa diselenggarakan secara hybrid atau kolaborasi daring dan tatap muka, guna menekan angka penularan Covid-19 di lingkungan kampus," ujar Nizam di Jakarta, Jumat (27/11).

Menurut Nizam, Satgas Covid-19 di kampus harus dibentuk untuk memulai perkuliahan tatap muka. "Pemerintah sudah mengizinkan Perguruan Tinggi diperbolehkan melakukan perkuliahan tatap muka pada semester depan atau Januari 2021. Untuk itu, sejumlah persiapan harus dilakukan sebelum kampus dibuka," tegasnya.

Nizam menyatakan, sebelum memulai perkuliahan, Perguruan Tinggi harus membentuk Satgas Covid-19 di kampus dengan menyusun protokol kesehatan dan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta memastikan SOP dapat diikuti oleh warga kampus," ujar Nizam.

Nizam juga meminta pihak kampus berkoordinasi atau mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membuka kampus. Koordinasi dengan Satgas di daerah hingga mendapatkan izin Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) juga menjadi barang wajib. "Dan kampus hanya menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Selain kegiatan pembelajaran tidak

boleh diselenggarakan seperti kegiatan ekstrakurikuler, kantin, *coworking space*, kegiatan olahraga atau kesenian, diskusi kelompok dan kegiatan lain yang menyebabkan kerumunan," terang Nizam.

Kemudian, harus dipastikan pula kapasitas ruang yang digunakan 50 persen dari kapasitas yang ada. Saat hadir pun seluruh warga kampus wajib menggunakan masker, menjaga jarak, dan kampus mesti menyediakan tempat cuci tangan atau *hand-sanitizer*.

Kampus juga diminta menyediakan alat *screening*. Minimal terdapat *thermogun*, alat *rapid test* dan adanya kesiapan melakukan *swab test* bagi yang *suspect*. "Yang hadir harus dipastikan sehat. Yang memiliki komorbid terkontrol harus ada persetujuan dari yang bersangkutan, baik itu dari orangtua atau wali. Jika tidak (mendapat persetujuan) warga kampus dapat untuk tetap mengikuti pembelajaran daring," lanjut Nizam. **(Ati)-d**

GERAKKAN MASYARAKAT HADAPI COVID-19

'Jogo Tonggo' Terima Penghargaan TOP 21

SEMARANG (KR) - Program 'Jogo Tonggo' yang diterapkan Pemprov Jawa Tengah mendapat penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) sebagai TOP 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19.

"Alhamdulillah kita mendapatkan apresiasi, meskipun kami sadar itu belum sempurna. Untuk itu kita sedang mencoba menyempurnakan dengan juga beradaptasi pada kondisi lokal yang ada di sana," ujar Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di ruang kerjanya di Semarang, Jumat (27/11).

Menurut Ganjar, Jogo Tonggo sebenarnya konsep yang didorong Pemprov Jateng untuk menggerakkan kekuatan masyarakat dan komuni-

tas untuk bangkit di masa pandemi Covid-19. Selain itu, agar tak bergantung pada Pemerintah semata.

Ganjar mengatakan, penerapan kebijakan Jogo Tonggo memiliki banyak harapan di dalamnya. Salah satunya masyarakat berinisiatif untuk mendata, jika ada tetangga yang sakit maupun tetangga yang melakukan perjalanan hingga edukasi dan sosialisasi di level terbawah.

Selain itu, Jogo Tonggo juga berkaitan geliat ekonomi. Dari Jogo Tonggo, menurut Ganjar, akhirnya menulurkan kreativitas-kreativitas warga dalam berdagang, seperti berdagang secara online, ada yang kemudian mengantar ke rumah-rumah dan sebagainya. "Termasuk juga ketika mereka bicara soal bagaimana

ketahanan pangannya bisa dijaga. Saya senang banyak warga mengajarkan kepada tetangga kiri-kanannya agar bisa menanam sendiri, merawat sendiri, makan sendiri dan itu artinya di rumah tangga mereka Insya Allah kecukupan gizinya akan bisa dipenuhi," tutur Ganjar.

Dari Jogo Tonggo pula, Ganjar mengatakan, sebenarnya banyak warga Jateng memang senang menolong. Bahkan, kepedulian semakin terlihat dan nilai-nilai seperti itulah yang musti dikembangkan dalam spirit kegotongroyongan. Jika Jogo Tonggo kebijakan yang sifatnya *bottom-up*, sekarang sedang disiapkan kebijakan bersifat *top-down*. Pemerintah sedang menyiapkan bagaimana vaksinasi harus berjalan. **(Bdi)-d**

POSITIF TERKENA COVID-19

KPU Gunungkidul Ganti 4 Petugas KPPS

GUNUNGKIDUL (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul akan mengganti empat petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dinyatakan positif terkonfirmasi Covid-19. Keempatnya diketahui terkonfirmasi positif dari hasil swab Dinas Kesehatan Gunungkidul.

"Upaya penggantian ini sebagai langkah antisipasi agar nantinya para KPPS yang positif bisa melakukan isolasi sebagaimana mestinya," kata Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul Ahmadi Ruslan Hani,

Jumat (27/11).

Selain empat petugas KPPS dinyatakan positif, juga terdapat pemilik rumah yang nantinya akan dijadikan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kapanewon Ngilipar dinyatakan terkonfirmasi Covid-19. Dengan hasil positif tersebut Dinkes masih melakukan *tracing* riwayat kontak. "Jadi untuk ketugasannya kami akan menggantinya, melalui proses rekrutmen sama seperti sebelumnya," kata Ahmadi.

Sejumlah logistik untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gunungkidul 2020 telah

diterima KPU. Sejak beberapa hari lalu, petugas sudah mulai melakukan pelipatan surat suara. Dalam penyortiran, ditemukan ribuan surat suara yang rusak dan akan dimusnahkan agar tidak disalahgunakan.

Anggota KPU Gunungkidul Rohmad Qomarudin menyampaikan, berdasarkan penyortiran terdapat 1.683 lembar surat suara yang rusak dan tidak dapat digunakan. Surat suara yang mengalami kerusakan tersebut nantinya akan dimusnahkan agar tidak disalahgunakan. **(Bmp)-d**

CEGAH KLASTER PERKANTORAN Setiap OPD Agar Disiplin Prokes

YOGYA (KR) - Untuk mencegah berkembangnya klaster perkantoran, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta melakukan pengecekan tentang kedisiplinan melaksanakan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19. Dari situ diharapkan bisa diketahui kekurangan atau persoalan yang ada di lapangan, sehingga adanya klaster perkantoran bisa diantisipasi sejak awal.

"Menyikapi munculnya beberapa klaster perkantoran, kami terus berupaya melakukan langkah-langkah pencegahan. Bahkan kami sudah menugaskan Satpol PP untuk mengecek masing-masing OPD, bagaimana menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Hasilnya, akan dilaporkan kepada Gubernur DIY," kata Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji di Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (27/11).

Baskara Aji mengungkapkan, kasus positif Covid-19 di DIY masih fluktuatif. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi seluruh masyarakat supaya penegakan prokes bisa diterapkan dengan baik.

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19 Berty Murtiningsih mengatakan, kasus positif Covid-19 di DIY bertambah 89 kasus menjadi 5.645. Sedangkan pasien sembuh bertambah 30 menjadi 4.230 dan kasus meninggal bertambah tiga menjadi 140 kasus.

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kulonprogo Baning Rahayujati mengatakan, 10 orang telah sembuh dari Covid-19, namun juga terjadi penambahan 14 orang yang terkonfirmasi positif. Pada 23 November, Pemkab Kulonprogo juga telah mengeluarkan Surat Edaran No 440/0771 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Menurut Baning, dari 14 penambahan tersebut, 13 melakukan isolasi mandiri (isoman) dan satu dirawat di RS Siloam Jogja. Karena kondisi RS Rujukan di Kulonprogo penuh semua. **(Ria/Ira/Wid)-d**

MOMENTUM PERINGATAN HKN Sosialisasikan Prokes 'Cita Mas Jajar'



KR-Istimewa

Senam bersama menyemarakkan HKN 56 Pung-gawa Puskesmas Gamping II.

SLEMAN (KR) - Momentum puncak Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-56 dimanfaatkan Punggawa Puskesmas Gamping II Kabupaten Sleman, untuk mensosialisasikan pesan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu sebagai upaya mengajak masyarakat untuk turut aktif mengatasi penyebaran Covid-19.

"Karena masih berada di tengah pandemi, kegiatan yang biasanya kami laksanakan di satu titik dengan menghadirkan lebih dari 400 orang, tahun ini kami bagi menjadi parade di empat titik. Kami tidak ingin kehilangan momentum menyampaikan pesan kesehatan, khususnya mengajak masyarakat disiplin berbudaya 'Cita Mas Jajar' atau cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak yang menjadi prinsip pengendalian Covid-19," kata Kepala Puskesmas Gamping II M Daroji SKM MPH di sela Peringatan HKN 56 Punggawa Puskesmas Gamping II, Jumat (27/11).

Karena itulah lanjut Daroji, dalam kesempatan tersebut juga dihadirkan Talkshow 'Menyongsong Vaksin Aman untuk Masyarakat Sehat'. Melalui talkshow tersebut terungkap, masyarakat sudah sangat menunggu hadirnya vaksin Covid-19. **(Feb)-d**